STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KASUS PENOLAKAN VAKSINASI OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IMELDA SARI
NIM. 160403044

Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
DARUSSALAM BANDA ACEH

2022-2023

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KASUS PENOLAKAN VAKSINASI OLEH MASYARAKAT

(Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Ar-Aranıry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah Prodi Manajemen Dakwah (MD)

Diajukan Oleh.

IMELDA SARI
NIM. 160403044

Disetujui Oleh

Pebimbing I	Pebimbing II
Dr. Mahmuddin, M.Si	**Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag.**
NIP. 197210201997031002	NIP. 197511032009011008

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :

IMELDA SARI
NIM. 160403044

Pada Hari/Tanggal

Minggu, 24 Juli 2022 M
25 Zulhijjah 1443 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekertaris
Dr. Mahmudin, S.Ag., M.Si	**Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag**
NIP. 197210201997031002	**NIP. 19751103200901 1008**
Penguji I	**Peguji II**
Fakhruddin, S.E., M.M.	**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag**
NIP. 196406162014111002	**NIDN. 2025119101**

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Imelda Sari
Nomor Induk Mahasiswa	: 160403044
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi	: Manajemen Dakwah (MD)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi oleh Masyarakat (Studi kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)" ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang pernyataan,

Imelda Sari
NIM 160403044

ABSTRAK

Nama : Imelda Sari

Nim : 160403044

Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi oleh Masyarakat (di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

Pembimbing 1 : Dr. Mahmuddin, M.Si

Pembimbing 2 : Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Darussalam (gampong Lam Gawee, gampong Lamreh, dan gampong Miruek Taman) Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi oleh Masyarakat. Adapun jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif pengambilan sampel menggunakan teknik *field research* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan melakukan wawancara pada 13 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah dalam menangani kasus penolakan vaksinasi di kecamatan Darussalam dengan melakukan sosialisasi vaksinasi serta pemberian sembako. Hal ini menunjang besarnya angka masyarakat yang bersedia untuk di vaksin seperti yang terlihat di gampong Lamreh. Sedangkan untung gampong Lam Gawee dan ganpong Miruek Taman termasuk berhasil akan tetapi tidak melebihi angka yang di capai oleh gampong Lamreh.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Daerah, Penolakan, Vaksinasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Penjelasan Istilah 9
BAB II LANDASAN TEORITIS **15**
A. Penelitian sebelumnya yang Relevan 15
B. Definisi Vaksin Covid-19 19
C. Sejarah Vaksin Covid-19 20
D. Dasar Hukum Vaksin Covid-19 25
E. Organisasi Penanganan Covid-19 26
F. Jenis-jenis Vaksin serta Kandungan didalamnya 29
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Pendekatan dan Metode Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 36
C. Objek dan Subjek Penelitian 38
D. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian 39
E. Informan Penelitian 36
F. Teknik Pengumpulan Data 40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **46**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi Vaksinasi 64
C. Strategi Pemerintah Daerah Menangani Penolakan VaksinasI 68
D. Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Mau untuk Melakukan Vaksinasi. 68
BAB IV PENUTUP **71**
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA **73**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk gampong Lam Gawee

Tabel 4.2 Jumlah Pendidikan di gampong Lam Gawee

Tabel 4.3 Jumlah Pekerjaan di gampong Lam Gawee

Tabel 4.4 Pembagian wilayah Menurut Dusun/ Jurong

Tabel 4.5 Organisasi Kepemudaan Gampong Lam Gawee

Tabel 4.6 Tuha Peut Desa Lam Gawee

Tabel 4.7 Vaksinasi Masyarakat Gampong Lam Gawee

Tabel 4.8 jumlah penduduk gampong Lamreh

Tabel 4.9 jumlah pekerjaan masyarakat di gampong Lamreh

Tabel 4.10 Vaksinasi Masyarakat Gampong Lamreh

Tabel 4.11 Stuktur Tuha Peut Gampong Miruek Taman

Tabel 4.12 jumlah pekerjaan di gampong Miruek Taman

Tabel 4.13 tentang vaksinasi masyarakat Miruek Taman

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kampus

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian dari Camat, Gampong LamGawee, Lamreh, Miruek Taman Kecamtan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Lampiran 4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PEBDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit Corona Virus 2019 (covid-19) merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Pada 31 Desember 2019 melaporkan awal mula terjadinya penularan Virus Corona (Covid-19) berasal dari kota wuhan yang merupakan salah satu Provinsi di Negara Cina dan hebatnya secara cepat menjangkit hampir seluruh Negara-negara di dunia sehingga WHO menyatakan bahwa dunia memasuki fase darurat secara global akibat pandemi yang berlangsung.[1]

Covid-19 menjadi masalah yang serius di seluruh dunia dan jumlah kasusnya meningkat setiap hari. Indonesia adalah satu Negara yang terkonfirmasi covid-19, pada maret 2020 Indonesia melaporkan 2 kasus terkonformasi covid-19. Berawal dari kasus tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona semakin bertambah setiap hari nya sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.[2] Wabah Covid-19 tentunya mengejutkan warga bagaimana berbahaya nya virus tersebut. Pemerintah dituntut serius untuk menangani virus corona di Indonesia dan Koordinasi menghentikan segala informasi simpang siur yang bertebaran di masyarakat. Oleh

---

[1] Yunus, Nur Rohim, dan Annissa Rezki. 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I 7(3).

[2] Zisi Lioni Argista, "Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19 di Sumatera Selatan", (Palembang: Universitas S riwijaya, 2021), h. 2.

karenanya pemerintah bertindak sigap dengan menggelar rapat Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOMINDA) baik di level provinsi maupun level Kabupaten/Kota, Paska kejadian meninggal nya pasien pertama Covid-19 tidak terkecuali di Daerah Provinsi Aceh.

Pada masa pandemi Covid-19 yang mengkhawatirkan, tentunya *higienitas* (kebersihan) sangat diperlukan. Salah satu *Rutinitas* (kebiasaan) yang sulit dihilangkan dari masyarakat Aceh adalah menghabiskan waktu di warung kopi. Tidak adanya protokol kesehatan yang memadai sehingga menyebabkan pencegahan Covid-19 ini susah untuk dikendalikan. Dengan demikian penyebaran covid-19 terus merajalela terkhusus nya di Aceh. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan Pandemi Covid-19 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara bertujuan guna meningkatkan performa penyelenggaraan Negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.[3]

Masih lanjut dengan permasalahan yang sama, Pemerintah Aceh mengeluarkan himbauan bersama yang berisi bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehari-hari serta aktivitas masyarakat berpedoman pada Peraturan Pusat nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penangganan Covid-19 ini cukup singkat, terdiri dari 5 halaman isi dan 2

---

[3] Eddy Munawar, "Studi Perilaku Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Pandemi Covid-19" Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, h. 5.

halaman penjelasan. Halaman isi terdiri dari 7 Pasal dengan inti sejumlah 5 Pasal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini.[4]

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka menangani yang sedang mewabah. Tindakan pemerintah memilih jalur social *distancing* diakibatkan faktor ekonomi karena kalau memilih jalur *lockdown*, maka bias berimbas pada aspek berkurangnya atau tidak adanya pendapatan Negara di bidang pariwisata, berkuragnya atau tidak adanya pendapatan Negara dari sisi pajak perusahaan, berkurangnya atau tidak adanya dibidang ekspor barang ke Negara lain dan bertambahnya pembiayaan kehidupan rakyat.

Sehari kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 bernomor 440/5242 yang berisi Wali Kota Aminullah Usman dimintai melakukan penutupan semua warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh, tempat-tempat keramaian dalam upaya pencegahan penyebarluasan Covid-19 untuk sementara waktu sampai keadaan membaik. Hal ini dilakukan supaya pusat-pusat keramaian dapat dikendalikan dengan baik.

Hal tersebut juga diikuti dengan penutupan sebagian mesjid-mesjid yang berada di kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh dan kota-kota lainnya. Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 29 Maret 2020, keluarlah maklumat pemberlakuan jam malam selama dua bulan dari Forkominda

---

[4] Malita Lely Rahmawati, "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19).

Provinsi Aceh yang bertujuan guna mencegah penyebar luasan pandemi Covid-19 di provinsi ini. Akan tetapi selang seminggu kemudian keputusan penting tersebut kembali dicabut oleh Pemerintah Aceh karena adanya desakan dari setiap elemen masyarakat bahwa dengan adanya keputusan tersebut maka roda perekonomian di Aceh tidak akan berjalan serta adanya ketakutan traumatis dari sebagian besar masyarakat Aceh akan kenangan pada masa konflik berdarah yang pernah terjadi di Provinsi ini. Kemudian pada Level Kabupaten/Kota, para Walikota dan Bupati juga berusaha mencegah penyebaran pendemi ini agar jangan sampai menjangkiti Masyarakat nya.

Dari segi ekonomi, dampak negatif yang langsung terasa dengan kebijakan ini adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Banyak masyarakat yang terkena imbasnya, terutama pada sektor jasa. Banyak warung serta tempat usaha yang tutup mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan, Jika kegiatan ekonomi tidak berlangsung dengan baik, maka akan semakin banyak penduduk yang jatuh miskin. Susahnya untuk mencari penghasilan menyebabkan perubahan pola perilaku dalam menyikapi musibah ini dengan cara merubah perilaku kerja. Hal tersebut menyebabkan perekonomian masyarakat semakin menurun sehingga menjadikan masyarakat semakin terpuruk.[5]

---

[5] A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy,"Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang di tempuh" *Jurnal* (Samarinda: Universitas Mulawarman), h. 207.

Perubahan-perubahan ini berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat, banyak hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan pada masa lalu menjadi kelaziman ketika di masa Covid-19, Pemerintah lalu melakukan tindakan tegas dengan membatasi mobilisasi dan ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas. Penyebaran yang begitu cepat juga membuat masyarakat panik sehingga di masa awal pandemi ini banyak masyarakat melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewajaran yaitu penimbunan barang kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan kenaikan harga barang yang tak terkendali sehingga menyebabkan keterbatasan ketersediaan barang seperti masker, diisinfektan, hand sanitizer dan barang pokok lainnya.

Selain anjuran menjaga jarak aman untuk jarak fisik *(physical distancing)* dan menjaga jarak aman untuk jarak sosial *(sosial distancing)* yang diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah juga memberlakuan seperti jam malam dan masih banyak kebijakan lainnya yang pada dasarnya bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona.[6] akan tetapi dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, telah menyebabkan masyarakat mengalami banyak kehilangan lapangan pekerjaannya. Seperti PHK (Pemberhentian Hak Kerja) besar-besaran dan berbagai macam pemberhentian kerja lainnya. Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, mengakibatkan masyarakat yang menjadi

---

[5] Hutapea, "Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Kasawan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara" *Jurnal Organisasi Manajemen*, Vol 4, No 1, 2017, h.

[6] Bpba.Acehprov.go.id. "Penerapan Jam Malam di Aceh Resmi Dicabut." Retrieved (https://Bpba.Acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penerapan-jammalam-di-Aceh-resmi-dicabut.html).

pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. baik itu untuk membayar tagihan listrik, air, membiayai sekolah anak dan lain-lain.

Dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19.[7] Perppu ini membahas dua hal yaitu mengenai kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah yang berhubungan dengan peraturan Kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan mengenai kebijakan stabilitas Sistem Keuangan Negara. Keuangan Daerah telah memperbaiki sistem perekonomian yang rusak, akibat oleh adanya virus corona ini, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi covid-19 hingga Rp 405,1 triliun.

Besar anggaran tersebut ditetapkan melalui peraturan pengganti perundang-undang Perppu tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi corona pemerintah dalam upaya menangani dampak penyebaran virus corona di Indonesia. Dana tersebut dialokasikan ke berbagai sektor seperti sektor kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan dimaksudkan untuk membantu masyarakat selama pandemi covid. bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.

---

[7] UU No. 2 Tahun 2020, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Di Tetapkan pada Tanggal 31 Maret 2020.

Oleh karena itu, pemerintah daerah menerapakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah bertambahnya angka penularan Covid-19 guna menstabilkan situasi untuk kembali normal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat melahirkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi pemerintah daerah dalam menangani penolakan Vaksinasi di Kecamatan Darussalam?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat menolak vaksinasi di Kecamatan Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menangani penolakan vaksinasi di Kecamtan Darussalam.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang memepengaruhi masyarakat menolak vaksinasi di Kecamatan Darussalam

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memeberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Manajemen Dakwah.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam menangani penolakan vaksinasi dan sejenis nya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, diantara nya:

a) Bagi penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman yang berguna untuk mengembangkan potensi pada masa yang akan datang serta sebagai sarana pembelajaran dalam menangani kasus penolakan vaksinasi ini.

b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan masukan atau sebagai ilmu baru untuk tata cara menerima vaksinasi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman guna menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami istilah karya tulis ini, maka pelu kiranya penulis menguraikan sedikit penjelasan konsep atau istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Strategi

Secara etimologi strategi merupakan sesuatu yang berasal dari kata yang dalam bahasa yunani, strategos. Adapun strategо yang merupakan terjemahan yang dapat diartikan sebagai "komandan militer" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang, yang berasal dari zaman demokrasi Athena. [8] Sedangkan terminologi strategi banyak ahli yang telah mengemukakan sudut pandang yang berbeda-beda tentang strategi, namun pada dasar hakikatnya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Suryono, strategi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran, dan cara. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan. [9]

Menurut pendapat Argyris, Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi.[10]

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu metode atau cara pencapaian tujuan secara efektif dan efisien

---

[8] Kasmira, "Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa" *Skripsi,* (Makassar: Universitas Muhammadiyah,2020), h.7.

[9] Suryono, " Pengantar Teori Pembangunan", (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004).

[10] Hutapea, "Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Kasawan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara" *Jurnal Organisasi Manajemen,* Vol 4, No 1, 2017, h.

dengan respon secara terus menerus terhadap peluang suatu rangkaian dari keputusan manajerial yang mliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol guna mengatasi permasalahan dan untuk memenuhi tujuan dari organisasi.[11]

Strategi juga disebut sebagai seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut agar dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi.[12]

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, kontrol. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.[13]

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan berasal dari bahasa inggris yaitu Government (perdana). Pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai upaya untuk mencapai tujuan Negara.

---

[11] Kasmira, "Strategi Pemerintah…, h. 8.

[12] Made W, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer In*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

[13] Dewita Hia, Y. "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran. Economica", Vol. 1, No. 2, 2015, h. 208-213

Menurut W.S Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.[14]

Sedangkan pemerintahan Daerah menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa "Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[15]

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16]

---

[14] Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11.

[15] Undang-Undang RI tentang Pemerintah Derah Nomor 23. Tahun 2014, h. 2.

[16] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Malang : Sinar Grafika, 2017), h. 1.

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[17] Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas- luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.[18] Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[19]Pemerintah daerah adalah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat Daerah.

Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

> "hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

---

[17] Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 18 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah, No 11, PUU-VI,2008, h. 4.

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 18 ayat 5 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, No 64, PUU-XVII,2010, h. 6.

[19] Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 18 ayat 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, No 64, PUU-XVII,2010, h. 5.

Pasal 18A ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

> "hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras bedasarkan undang-undang."[20]

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa Mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah di olah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekbalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.[21]

Vaksinasi Covid-19 dari tinjauan imunisasi memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan mengurangi transmisi terhadap penularan penyakit Covid-19.
2. Jangka panjang, untuk mengendalikan pandemi dengan memantau perkembangan infeksi virus SARS-CoV-2 ditinjau dari sisi epidemiologi; menemukan skala prioritas target sasaran maupun darah untuk diberikan vaksin Covid-19, dengan memperkirakan jumlah subjek yang diimunisasi

---

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 18A ayat 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, No 64, PUU-XVII,2010,h. 11

[21] Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), No 84, Tahun 2020, h. 3.

untuk menghasilkan herd immunity yang dapat mengontrol pandemi; pemberian imunisasi Covid-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Infeksi Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk *herd immunity*, maka menunda vaksinasi dapat menjadi ancaman atau berpotensi menjadi ancaman terhadap laju penularan wabah Covid-19.[22]

Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan di peroleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman, kejadian ikutan pasca Imunisasi(KIPI) yang minimal, serta pengetahuan dan kepatuhan orang tua pada jadwal vaksinasi.[23]

---

[22] Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca No 14, Tahun 2021, h.10.

[23] Dr. dr. Martira Maddeppungeng, SpA(k), *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), h. 2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki kemiripan variabel dan obyek, penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bentuk dan upaya pembanding antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sehingga akan mendapatkan kesamaan dan perbedaan dari aspek hasil, penelitian terdahulu juga sangat perlu dianalisis, agar kemudian peneliti tau bahwa antara apa yang akan diteliti tidak ada plagiat dengan peneltian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitan yang sudah pernah dilakukan yang memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Kementerian kesehatan, ITAGI, UNICEF, dan WHO menyatakan bahwa pada tangal 6 Oktober 2020, presiden menandatangani dan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Perpres tersebut menetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksinasi. perpres tersebut menetapksn PT. Bio Farma,perusahaan farmasi milik Negara, untuk menyediakan vaksin melalui kerja sama dengan berbagai institusi internasional. Perpres ini juga menetapkan kementerian kesehatan (kemenkes) mengatur jalannya distribusi vaksin dan program

vaksinasi nasional. Berdasarkan survey, tingkat penerimaan vaksin paling tinggi tamapak di provinsi- provinsi di pulau papua, jawa,dan Kalimantan. Tingkat penerimaan di beberapa provinsi di sumatera, Sulawesi dan Maluku lebih rendah. Provinsi papua barat paling tinggi tingkat penerimaan nya (74%) dibandingkan dengan seluruh provinsi lainnya, sedangkan provinsi Aceh paling rendah (46%). Alasan nya adalah terkait dengan keamanan vaksin (30%), ketidakpercayaan terhadap vaksin(13%), kekhawatiran adamya efek samping seperti demam dan nyeri (12%), dan alasan keagamaan (8%).[24]

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ade Heryana, Prodi kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul yang mengangkat mengenai " Penolakan Terhadap Vaksinasi" pada tahun 2020. Hasil penelitian dan Analisis Data menunjukkan bahwa Pada dasarnya terdapat tiga jenis sikap kelompok masyarakat terhadap vaksinasi, antara lain: Kelompok penerima vaksin (vaccine acceptance), Kelompok ragu-ragu terhadap (vaccine hesitancy), Kelompok penolak vaksin (vaccine refusal). Untuk menggambarkan bagaimana kondisi penolakan vaksinasi di Indonesia, sebuah studi kualitatif telah dilakukan pada tahun 2017 di Tembalang, Semarang.[25]

Sebagian besar masyarakat tidak memberikan imunisasi dasar pada anaknya. Ketidaklengkapan pemberian imunisasi dasar oleh sebagian masyarakat dikarenakan

---

[24] Kemenkes RI, Survey Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia, Tahun 2020, h. 8.

[25] Ade Heryana, SSt. MKM, "Penolakan Terhadap Vaksinasi" *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020). h 15.

beberapa alasan, diantaranya: kesalahpahaman mereka terhadap informasi tentang imunisasi yang diperolehnya, seperti diduga mengandung babi, imunisasi merupakan program yahudi, imunisasi merupakan program WHO untuk negara berkembang, imunisasi tidak ada dalam Islam, dan ingin mengikuti cara hidup Rasulullah.[26] Meski tidak memberikan imunisasi, sebagian masyarakat tidak merasa khawatir akan risiko tertular penyakit. Sebagian masyarakat lebih memilih alternatif lainnya seperti obat herbal (madu, jeli gammat, zaitun, habbatusauda, kismis, dan sari kurma). Ada pula yang menempatkan potongan bawang merah di sudut ruangan untuk mencegah penyakit.[27]

Seluruh masyarakat mengetahui manfaat imunisasi, namun mereka ragu dengan manfaat tersebut. Hal ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman, bahwa anak yang ikut imunisasi tetap sakit.[28]

Dari sudut pandang agama, ada dua aliran berbeda. Kelompok pertama menyatakan imunisasi boleh dilakukan dalam agama, tidak haram dan meyakini imunisasi program pemerintah yang bertujuan baik. Kelompok lainnya menyatakan imunisasi haram karena kehalalan bahan pembuatnya masih diragukan. Seluruh

---

[26] Pratiwi Sulistiyani, Zahroh Shaluhiyah, Kusyogo Cahyo, Gambaran Penolakan Masyarakat terhadap Imunisasi Dasar lengkap bagi Balita (Studi di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang), *Jurnal* Kesehatan Masyarakat, Vol 5 No 5, Oktober 2017, h.1083-1084

[27] Ade Heryana, SSt. MKM, "Penolakan…, h. 7.

[28] Pratiwi Sulistiyani, Zahroh Shaluhiyah, Kusyogo Cahyo, Gambaran Penolakan…, h.1087

masyarakat yang menyatakan haram tidak mengetahui tentang fatwa MUI No.4 tahun 2016 yang menyatakan imunisasi adalah mubah (boleh).[29]

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2021 yang mengangkat mengenai Buletin APBN vol. VI, Edisi 4 "Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19". Hasil penelitian menunjukkan bahwa, salah satu uapaya pemerintah dalam rangka mencegah dan menggurangi penyebaran Covid-19 ialah dengan program vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Dalam pelaksanaan nya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan Vaksinasi, antara lain: keterbatasan persediaan vaksin, adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan pendistribusian vaksin Covid-19. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, diperlukan koordinasi antara Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dengan lembaga Keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kemenkes pelu melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19.[30]

Penelitian keempat yang dilakukan oleh WARTA PEMERIKSA EDISI 7, VOL IV, juli 2021 mengangkat mengenai "BPK SOROTI PROGRAM VAKSINASI COVID-19". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya

---

[29] Ade Heryana, SSt. MKM, "Penolakan …, h. 1-5

[30] Buletin APBN: Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Vol VI, Maret 2021, h. 7.

melakukan pengadaan vaksin melalui berbagai skema, bilateral maupun multiteral. Bantuan dan dukungan vaksinasi dari lembaga internasional seperti COVAX Facility atau GAVI sangat membantu pemerintah dalam mengadakan vaksin bagi seluruh masyarakat,dan pemerintah juga berkomitmen untuk mengadakan vaksinasi Covid-19 ke seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Dalam arahan Kepala Negara pada 19 juli 2021, pemerintah daerah (pemda) diminta tidak ragu untuk membelanjakan uang terutama belanja produktif dan dilakukan dalam rangka mengatasi Covid-19. [31]

B. Definisi Vaksin

Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa Mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah di olah menjadi toksoid atau diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekbalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.[32]

Tujuan dibuatnya vaksin ialah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai imunitas

---

[31] Warta Pemeriksa: BPK Soroti Program Vaksinasi-19 Vol IV, Juli 2021, h.12.

[32] Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19), No. 84, Tahun 2020, h. 3.

kelompok dan melindungi masyarakat dari Covid-19 sehingga dapat menjaga produktivitas social dan ekonomi.[33]

Menurut Menteri Kesehatan, vaksin Covid-19 memiliki tiga manfaat. Termasuk di dalamnya adalah menambah kekebalan setiap orang yang divaksinasi secara langsung, jika jumlah penduduk yang di divaksinasi banyak, maka sistem kekebalan penduduk akan memberikan perlindungan bagi mereka yang belum divaksinasi atau belum menjadi populasi sasaran vaksin.[34]

Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan di peroleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman, kejadian ikutan pasca Imunisasi(KIPI) yang minimal, serta pengetahuan dan kepatuhan orang tua pada jadwal vaksinasi.[35]

C. Sejarah Vaksin

Perkembangan vaksin diawali dengan penemuan Edward Jenner pada tahun 1798, bahwa inokulasi cacar sapi (*cowpor*) pada seseorang ternyata dapat melindungi orang tersebut dari penyakit cacar (*smallpox*). Sejak saat itu vaksin mengalami perkembangan, baik cara menentukan epitope yang bersifat imunodominan, strategi perbanyakan protein maupun cara aplikasinya.[36]

---

[33] Zisi Lioni Argista,"Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 di Sumatera Selatan", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya,2021), h.13.

[34] yudho winanto (2020) Mengenal jenis dan manfaat vaksin Covid-19, h.20.

[35] Dr. dr. Martira Maddeppungeng, SpA(k), *Buku Panduan*…, h.2.

Louis pastour dan kawan-kawan pada tahun 1880 telah menemukan cara vaksinasi untuk pencegahan penyakit infeksi melalui penggunaan agen penyakit yang telah dilemahkan terlebih dahulu (*vaksin attenuated*), antara lain vaksin rabies yang berasal dari virus alam yang sangatn ganas (*street virus*) menjadi virus yang tidak ganas (*fix virus*) setelah mengalami pasase berulang. Pada tahun 1886 salmon dan Smith di Amerika telah memperkenalkan inaktif dengan menggunakan bakteri vibrio cholera yang dimatikan dengan pemanasan.[37]

Berdasarkan bahan imun yang digunakan ada dua jenis vaksin, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin yang berasal dari mikroba secara utuh baik vaksin aktif maupun vaksin inaktif tentu mempunyai kelemahan karena ada bagian tertentu yang harus dihilangkan yang tidak bersifat imunogenetik. Vaksin subunit merupakan vaksin yang dibuat dari komponen yang imunogenik. Teknik yang relatif baru dalam produksi vaksin adalah dengan melakukan kloning dari gen virus melalui rekombinasi DNA, vaksin vektor virus dan vaksin antiindiotipe.

Vaksin aktif terbuat dari virus hidup yang di atenuasikan dengan cara pasase berseri pada biakan sel tertentu. Dalam proses ini akumulasi dari mutasi umumnya menyebabkan hilangnya virulensi secara progresif bagi inang aslinya. Di dalam vaksin mengandung virus hidup yang dapat bereplekasi dan merangsang respon imun tanpa menimbulkan sakit. Aplikasi vaksin aktif tidak hanya secara suntikan

---

[36] Rahayu Ernawati, ”Peran Vaksinasi dalam Mengantisipasi Penyakit Zoonosis akibat Pemanasan Global”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2008), h.2.

[37] Rahayu Ernawati, ”Peran Vaksinasi…, h. 3.

intramuskuler, subkutan atau intrakutan melainkan dapat secara lokal pada mukosa secara intraocular, intranasal spray ataupun dalam air minum atau dicampur dalam pakan seperti contoh pada vaksin ND strain V4.

Vaksin inaktif dihasilkan dengan dihilangkan infektivitasnya sedangkan imunogenitasnya masih di pertahankan dengan cara fisik misalnya dengan pemanasan, radiasi, chemis, dengan bahan kimia fenol, betapropiolskton, formaldehid,etilenimin, dengan perlakuan ini virus menjadi inaktif tetapi imunogenitasnya masih ada. Vaksin inaktif biasanya dicampur adjuvant untuk meningkatkan timbulnya respon imun dengan cara membentuk depo pada suntikan yang memungkinkan pelepasan antigen sedikit demi sedikit sepanjang waktu. Vaksin ini sangat aman karena tidak infeksius namun diperlukan jumlah yang banyak untuk menimbulkan respon antibody.

Vaksin subunit merupakan vaksin yang dibuat dari bagian tertentu dari virus yang imunogenik secara alamiah misalnya hepatitis B atau dengan memisahkan dan memurnikan protein tertentu yang imunogenik. Vaksin sub unit yang telah menunjukkan keberhasilannya antara lain adalah vaksin terhadap FMD (Foot and Mouth Disease), rabies, influenza, herpes simplex,IBD (Infectious Bursal Disease) dan lain-lain.

Vaksin idiotip merupakan vaksin yang dibuat berdasarkan sifat bahwa antiidiotip mempunyai sekuens yang sama seperti epitop yang dibentuk. Antiidiotip dapat menginduksi respon imun dan dapat menetralisir epitop pada antigen asli.

Vaksin ini dapat menghambat pertumbuhan virus melaluinetralisasi. Vaksinasi dengan vaksin jenis ini masih dalam percobaan.[38]

Vaksin rekombinan memungkinkan produksi protein virus dalam jumlah besar. Genom virus yang diinginkan diklon pada plasmid kemudian didiekspresikan dalam system ekspresi misalnya sel bakteri E.coli, yeast, dan baculovirus. Dengan teknologi DNA rekombinan selain dihasilkan vaksin protein juga dihasilkan vaksin DNA.

Vaksin DNA (naked plasmid DNA), suatu pendekatan yang relatif baru dalam teknologi vaksin yang memiliki potensi dalam menginduksi imunitas seluler. Dalam vaksin DNA gen tertentu dari mikroba diklon kedalam suatu plasmid bakteri yang direkayasa untuk meningkatkan ekspresi gen yang diinsersikan ke dalam sel mamalia. Setelah disuntikkan DNA plasmid akan menetap dalam nucleus sebagai episom, tidak berintegrasi ke dalam DNA (sel kromosom). Selain itu vector plasmid mengandung sekuens nukleotida yang bersifat imunostimulan yang akan menginduksi imunitas seluler.

Vaksin Reverse Genetic merupakan suatu terobosan cara pembuatan vaksin mutakhir yang sangat ganas. Vaksin ini terutama dibuat dari agen penyakit yang mempunyai banyak fragmen RNA/DNA. Secara prinsip, vaksin ini dibuat melalui mutasi buatan dari fragmen yang menyebabkan sifat ganas dari agen tersebut,

---

[38] Rahayu Ernawati, ”Peran Vaksinasi…, h. 4.

sehingga menjadi tidak ganas kembali. Kemudian fragmen lainnya diganti dengan fragmen dari agen yang sangat lemah. Salah satu tujuan dalam pembuatan vaksin Reverse Genetic ini adalah dalam proses pembuatannya tidak membahayakan lingkungan dan dapat menghasilkan produksi vaksin(yield) yang tinggi.[39]

Indonesia juga punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi. Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dieradikasi yaitu di musnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi campak distop pada tahun 1980. Pun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1972. Indonesia akhirnya mencapai bebas polio tahun 2014. Saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi polio yang di targetkan pada tahun 2023.[40]

Semenjak vaksin untuk COVID-19 ditemukan dan mulai diuji coba serta siap diproduksi massal, banyak negara yang mulai melakukan vaksinasi terhadap warganya agar bisa memutus penyebaran dan memusnahkan COVID-19, salah satunya adalah Indonesia.

---

[39] Rahayu Ernawati, ”Peran Vaksinasi…, h. 5.

[40] Kemenkes RI, Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

D. Dasar Hukum Vaksin

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [41] Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.[42]

Kondisi penyebaran COVID-19 sudah hampir menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah kasus yang semakin meningkat membuat Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).[43] Di samping itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.[44] Sebagai bentuk penanggulangan COVID-19, Indonesia mengambil kebijakan untuk

---

[41] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

[42] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, (Jakarta: Konstitusi Perss), h. 12.

[43] Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), No. 11, Tahun 2020.

[44] Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), No. 12, Tahun 2020.

melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, menurut pakar hukum tata negara Yusil Ihza Mahendra, landasan hukum tersebut dianggap "tanggung" karena tidak memuat sanksi bagi para pelanggarnya.

Kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi juga dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19).[45]

Kebutuhan hukum lainya juga dekeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum dibolehkan nya Penggunaan Vaksin covid-19 produk Astra Zeneca.[46]

E. Organisasi Penanganan Covid-19

Sinergi untuk menanggulangi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional juga dikokohkan di tingkat nasional melalui adanya komite khusus yang menangani.

---

[45] Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), No. 84, Tahun 2020.

[46] Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca No.14 Tahun 2021,h.12

Dalam perkembangannya, komite ini juga mengalami penyesuaian untuk mempercepat penanganan di sektor kesehatan dan ekonomi. Pada awal Maret 2020 ketika wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, Pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 13 Maret 2020.[47] Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas ini dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
b. Mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19.[48]

---

[47] Keputusan Presiden RI tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1, No. 7, tahun 2020.

[48] Kementrian Keuangan, *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, h. 41.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A. Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Menteri Kesehatan; dan

4. Menteri Keuangan.

B. Pelaksana

Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil ketua : 1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan

2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota : 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Unsur Kementerian Kesehatan;

3. Unsur Kementerian Dalam Negeri; Unsur Kementerian Luar Negeri;

5. Unsur Kementerian Perhubungan;

6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Unsur Kementerian Agama;

9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;

11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

12. Unsur Kantor Staf Presiden.[49]

F. Jenis- Jenis Vaksin serta Kandungan didalamnya

Menurut Kemenkes dalam Zisi Lioni Argista, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan ada 6 jenis vaksin covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, di antaranya ialah:

1. Vaksin Merah Putih

Indonesia saat ini sedang mengembangkan vaksin dalam negeri yang diberi nama vaksin merah putih. Vaksin merah putih merupakan cerminan dari sinergi *triple helix*, karena dalam proses pembuatannya melibatkan pemerintah (Kementrian/Lembaga), Perguruan tinggi dan industri. Ada tujuh tim yang terlibat, yaitu Universitas Airlangga (Unair), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (Unpad), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Vaksin Merah Putih dari Tim Unair yang bekerja saama dengan PT Biotics Pharmaceuticals memiliki perkembangan paling cepat. Penelitian tentang vaksin

---

[49] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

tersebut dimulai pada pertengahan 2020. Platform vaksin yang dikembangkan adalah platform *adenovirus* dan *inactivated virus* dengan RNA virus yang sudah di gugurkan. Dari kedua platform tersebut, hanya platform *inactivated virus* yang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Virus yang di gunakan dalam vaksin tersebut adalah virus yang ada di Indonesia sehingga diharapkan sesuai dengan kondisi tubuh masyarakat Indonesia. Vaksin ini menggunakan virus yang berasal dari pasien Covid-19 di surabaya.[50]

Vaksin merah putih tersebut merupakan hasil kerjasama BUMN PT. Bio Farma (Persero) dengan lembaga Eijikman. Pemerintah berharap vaksin merah putih selesai pada akhir 2021. Bio Farma juga bekerja sama dengan perusahaan vaksin china Sinovac Biotech.

2. Astra Zeneca

Astra Zeneca merupakan perusahaan farmasi dari inggris yang telah melakukan pengembangan vaksin covid-19 bersama Oxford University. Vaksin Astra Zeneca dibuat dari versi lemah virus flu biasa yang berasal dari simpanse yang telah dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia dan hingga Saat ini uji coba masih terus berlangsung dengan melibatkan sebanyak 20.000 sukarelawan. Vaksin

---

[50] Nur Sholikah Putri Suni, "Perkembangan Vaksin Merah Putih dan Tantangannya", *Jurnal Info Singka*t, Vol. 16, No 4, Februari 2022, h. 26.

Astra Zeneca dianggap mudah untuk dikeluarkan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin.[51]

3. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)

Sinopharm Grup Farmasi Nasional China juga mengembangkan vaksin Covid-19 yang serupa dengan sinovac, yaitu merupakan vaksin yang aktif dengan cara kerja yang serupa dengan sinovac. Meskipun tahap pengujian terakhir belum selesai di cina, sekitar 1 juta orang telah di vaksinasi berdasarkan izin penggunaan darurat. Sebelum Sinopharm terbukti benar-benar suksek, itu hanya digunakan untuk pejabat china, pekerja keliling dan pelajar. Pada September 2020, Uni Emerat Arab adalah Negara pertama di luar china yang menyetujui penggunaan vaksin tersebut.

4. Moderna (spikevax)

Spikevax (Moderna) adalah vaksin yang dapat mencegah orang jatuh sakit akibat Covid-19. Diperlukan dua dosis, biasan nya diberikan dengan interval 4-6 minggu (dalam keadaan khusus intervalnya mungkin lebih lama). Vaksin moderna covid-19 tidak mengandung virus hidup. Vaksin ini memberi kode genetic untuk bagian penting virus SARS-CoV-2 yang disebut protein lonjakan (spike protein). Setelah mendapatkan vaksin, tubuh anda akan membuat salinan protein lonjakan. SIstem kekebalan anda kemudian akan belajar mengenali dan melawan virus SARS CoV-2 yang menyebabkan covid-19. Kode genetik dipecah dengan cepat oleh tubuh.

---

[51] Rochani Nani Rahayu1, Sensusiyati2, "Vaksin Covid 19 di Indonesia : Analisis Berita Hoax*", Jurnal Ekonomi, Sosial, Humaniora*, Vol. 2, No 7, Februari 2021, h. 44.

Moderna mengklaim tingkat efektif produksi vaksinnya adalah 94,5%. Di penghujung November, Moderna mengaku telah mengajukan permohonan penggunaan darurat vaksin Covid-19 ke badan regulasi Amerika Serikat dan Eropa. Moderna yakin bahwa vaksinnya memenuhi persyaratan penggunaan darurat yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA) AS.[52]

5. Pfizer Inc and BioNtech

Vaksin Pfizer dan BioNTech telah menyarankan BPOM di Amerika Serikat dan Eropa untuk segera menggunakan vaksin virus corona mereka. Dalam uji coba terakhir pada 18 November 2020, mereka mengklaim bahwa 95% vaksin tersebut efektif melawan virus corona dan tidak ada bahaya keamanan.

Adapun kandungan vaksin Pfizer Inc and BioNTech adalah mRNA, *lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N- ditertradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-Phosphocholine, and cholesterol, potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dehydrate and sucrose* di uji klinis yang melibatkan sekitar 20.000 relawan berusia 16 tahun ke atas. Efek samping yang dilaporkan akibat pemakaian vaksin Pfizer- BioNTech adalah: nyeri di tempat bekas suntikan, ,erasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil,demam, nyeri

---

[52] Rochani Nani Rahayu1 , Sensusiyati2, "Vaksin Covid…, h. 42.

sendi, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, mual, kurang enak badan, pembengkakan kelenjar getah bening (*limfadenopati*). [53]

6. Sinovac Biotech Ltd

Perusahaan biofarmasi yang berkedudukan di Beijing China tersebut mendukung pemanfaatan CoronaVac yaitu vaksin yang tidak aktif. Vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang system kekebalan tubuh terhadap virus tanpa memberikan respon terhadap penyakit yang serius. coronaVac adalah metode vaksin yang lebih tradisional seperti digunakan pada banyak vaksin diantaranya adalah vaksin rabies. Disebutkan salah satu keunggulan utama dari vaksin sinovac adalah dapat disimpan di lemari es standar dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Saat ini, coronaVac sedang memasuki uji coba fase 3. Sinovac sedang menguji vaksinya di Brazil, Indonesia, Bangladesh. Seperti yang ditunjukkan pada hasil awal pada monyet yang dipublikasikan di jurnal Science, antibody yang di hasilkan oleh vaksin tersebut dapat menetralkan 10 strain Sars-coV-2.[54]

7. Vaksin Lanjutan (booster)

Berdasarkan surat edaran tentang Covid-19 dosis lanjutan (Booster) menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemberian vaksin ini dengan ketentuan sebagai berikut :

---

[53] Rochani Nani Rahayu1 , Sensusiyati2, "Vaksin Covid…, h. 43.

[54] Rochani Nani Rahayu, Sensusiyati, "Vaksin Covid-19…, h. 42-43.

a. Vaksinisasi Covid-19 dosis lanjutan (Booster) adalah vaksinasi Covid-19 setelah seseorang mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

b. Vaksinasi Covid-19 dosis lanjutan (Booster) diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Sasaran vaksinasi program dosis lanjutan (Booster) adalah masyarakat usia18 tahun ke atas dengan prioritas yaitu kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais

d. Pelaksanaan vaksinasi program dosis lanjutan (Booster) bagi sasaran lansia dapat dilaksanakan dapat dilaksakan secara serentak diseluruh kabupaten atau kota, sementara sasaran non-lansia dilaksanakan di kabupaten atau kota yang sudah mencapai cakupan dosis minimal 1 total 70% dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60%.

e. Pemberian dosis lanjutan (Booster) dilakukan melalui 2 mekanisme yaitu :

1) Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (Booster) dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat selanjutnya.

Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (Booster) dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya.[55]

[55] Kemenkes RI, Surat Edaran Tentang Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian (*research*) berasal dari bahasa Prancis *recerchier* atau *recherce* yang merupakan gabungan dari kata "re" dan "cerchier" atau *sercher* yang memiliki makna mencari atau menemukan. Dalam arti luas *research* diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, informasi dan fakta yang memiliki tujuan tertentu.[56]

Menurut para ahli *research* (adalah penelitian yang bersifat ilmiah merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang sistematis, terkendali/terkontrol dan bersifat empiris dan kritis mengenai sifat atau proposisi tentang hubungan yang diduga terdapat di antara fenomena yang diselidiki.

Pendapat yang lainnya juga menyatakan bahwa penelitian itu merupakan suatu analisis yang sistematis dan objektif, serta observasi yang terkontrol yang membimbing ke arah pengembangan yang generalisasi, prinsip, teori, prediksi dan tujuan yang berdasarkan kejadian-kejadian.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai lokasi penelitian. Adapun daftar desa yang berada di Kecamatan

---

[56] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 25

Darussalam yaitu: 1) Berabung; 2) Lam Keuneung; 3) Lam Ujong; 4) Lamduroy; 5) Lamgawe; 6) Lampuja; 7) Lampuuk; 8) Limpok; 9) Lamtimpeung; 10) Tanjong Deyah; 11) Tanjong Selamat; 12) Tungkop; 13) Krueng Kalee; 14) Lam Asan; 15) Lambiheu Siem; 16) Lambitra; 17) Lamklat; 18) Lamreh; 19) Lie Eue; 20) Siem; 21) Angan; 22) Gampong Blang; 23) Gampong Cot; 24) Lambada Peukan; 25) Lambaro Sukon; 26) Lambiheu; 27) Lampeudaya; 28) Miruk Taman; 29) Suleu.

Adapun subjek penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tiga desa di kecamatan Darussalam yaitu:

1.) LamGawee, peneliti memilih desa ini dikarenakan desa ini sebagai perwakilan mukim Tungkop.
2.) Lam Gawee, peneliti memilih desa ini dikarenakan desa ini sebagai perwakilan mukim Siem.
3.) miruk taman, peneliti memilih desa ini dikarenakan desa ini sebagai perwakilan mukim Lambaro Angan.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Sumber penelitian disebut juga dengan sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data. Jika peneliti menggunakan teknik kuesioner dan wawancara dalam mengumpulkan data maka sumber datanya disebut dengan

responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan.[57]

Penentuan sumber penelitian lapangan atau subjek penelitian dapat melalui teknik sampling (untuk penelitian kuantitatif) atau melalui teknik pemilihan informan kunci (untuk penelitian kualitatif). Sementara untuk penelitian kepustakaan penentuan sumber penelitiannya dapat dilakukan melalui pemilahan sumber primer dan sumber sekunder (buku primer dan buku sekunder).

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.

Menurut Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.

Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Sesuatu yang dalam dirinya

---

[57] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 60.

melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian.

Subjek penelitian jika berbentuk orang ada yang disebut dengan responden dan ada pula yang disebut dengan informan. Sebenarnya, keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Hanya saja, istilah responden banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif sementara istilah informan digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah ‘orang dalam’ pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[58]

D. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat penelitian, sehingga diharapkan dalam kegiatan pengumpulan dan analisis data bias sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus dalam penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penolakan Kasus Vaksinasi oleh Masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

---

[58] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, h. 61-62.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan yang ditetapkan untuk mengarahkan agar penelitian menjadi fokus dan tidak keluar dari konteks serta tujuan penelitian, mencakup cakupan dan waktu bahasan. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup Realisasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi Oleh Masyarakat.

E. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/ permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci
2. Informan utama
3. Informan pendukung

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya megetahui tentang kondisi/ fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Sedangkan informan pendukung merup akan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang

memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.[59]

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum mengangkat penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi terhadap penolakan vaksinasi di kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Dan peneliti melakukan observasi awal terhadap lokasi tersebut guna memastikan kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang akurat maka peneliti mengumpulkan data dengan cara Pengamatan (obsevasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh objek penelitan dalam hal tertentu dengan pola rutinitas dan interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari.[60] Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan , dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer)* dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi *(observed*).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan observasi:

---

[59] Ade Heryana,S.St, M.KM "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul), h. 4-6.

[60] Anggito Albi, ddk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak. 2018), h. 109.

a) Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
b) Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengandalkan kekuatan daya ingat.
c) Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara kuantitatif.
d) Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk diuji kebenarannya.

Keempat hal tersebut menuntut adanya pedoman observasi yang dipersiapkan secara sistematika, misalnya untuk observasi terhadap kehadiran pegawai dalam melaksa nakan tugas sehari-hari sebagai salah satu tolak ukur dalam penelitian masalah disiplin kerja.[61]

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara disebut (*interviewed*).

Interviewe dibedakan ke dalam dua macam, yaitu (1) responden dan (2) informan. Responden adalah sumber data primer, data tentang dirinya sendiri sebagai objek sasaran penelitian, sedangkan informan ialah sumber data skunder, data tentang pihak lain, tentang responden.

---

[61] H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h: 104-105

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara :

1.) Menjalani hubungan baik dengan yang akan diwawancarai serta menjelaskan maksud dari wawancara yang akan dilakukan dengan harapan dapat mengungkapkan sebanyak mungkin data yang ingin digali.
2.) Menyampaikan pernyataan yang tercantum dalam kuistioner (berasal dari bahasa inggris yaitu *quesionaire* yang artinya serangkaian pertanyaan) yang disusun secara sistematika. Bila daftar pertanyaan ini dipegang oleh pewawancara sebagai pedoman disebut pedoman wawancara, bila disebarkan untuk diisi langsung oleh responden disebut pedoman angket.
3.) Mencatat semua jawaban lisan yang diberikan oleh responden / informan secara teliti, efisien dan efektif dengan memperhatikan maksud yang tersirat dalam jawaban itu.[62]

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikologi dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.[63] Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber

---

[62] H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi*….., h. 105-106.

[63] H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi*….., h. 112.

informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis dan cerita.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya akan dikembangkan akan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dengan data tersebut, selanjutnya akan dicarikan data secara bertahap-tahap sehingga dapat disimpulkan berulang-ulang dengan teknik triangulasi sehingga hipotesis tersebut berkembang menjadi suatu teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dari lapangan.[64]

Dalam penelitian ini aktivitas analisis data yaitu *Reduction*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing/Verification.*

---

[64] Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 81.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data juga merupakan proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi, laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.[65]

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchatt* dan sejenisnya. Dalam penyajian data hal yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data tesebut, maka akan memudahkan memahapi apa yang sedang terjadi, lalu merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verification

---

[65] Kasmira., *Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gow,(*Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020), h. 34.

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal serta didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.[66] Penarikan kesimpulan dalam penelitian, inilah langkah akhir dari analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini.

[66] Kasmira., *Strategi Pemerintah…,* h. 35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran lokasi penelitian dimaksud untuk memberikan gambaran diperlukan sebagai penunjang bagi pembahasan hasil penelitian. Oleh karena itu deskripsi lokasi penelitian merupakan gambaran awal dari hasil penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Kantor Camat yang terletak di jalan Lambaro Angan-Cot Paya, gampong Lambada peukan, kemukiman Lambaro angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam dipimpin oleh seorang Camat bernama Burhanuddin Sos.I dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Camat beliau dibantu oleh jajaran staf lainnya seperti Sekcam, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan *Gampong* (PMG), Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (TRANTRIB), Kasi Kesejahteraan Sosial (KESSOS), Kasi Pelayanan Umum dan staf lainnya. Perangkat tersebut bahu membahu demi membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kecamatan Darussalam.

Kecamatan Darussalam sendiri terdiri dari 29 *Gampong* (Desa), dimana *Gampong* (Desa) tersebut adalah:

1. Lambada Peukan
2. Miruek Taman
3. Lambiheu La
4. Lampeudaya
5. Gampong Cot
6. Gampong Blang
7. Lambaro Sukon
8. Suleue
9. Angan
10. Lamreh
11. Lambiheu Siem
12. Lam Asan
13. Lambitra
14. Siem
15. Krueng Kalee
16. Lieu
17. Lamklat
18. Lampuuk
19. Tanjong Selamat
20. Lampuja
21. Lam Gawee

22. Tanjong Deah
23. Lamduro
24. Tungkop
25. Lamkeuneung
26. Lamtimpeung
27. Limpok
28. Lam Ujong
29. Berabung.[67]

Untuk memudahkan Peneliti dalam melakukan Penelitian, peneliti memilih Tiga gampong yang berada di Kecamatan Darussalam sebagai subjek penelitian, Adapun ketiga gampong tersebut yaitu:

1. Lam Gawee

Gampong Lam Gawee memiliki luas tanah 134.575,50 m2. Terletak di jalan Blang Bintang lama, kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari 3 dusun, yaitu: (1) dusun Mulia; (2) dusun Balee Lheuk; (3) dusun Tengku Jurong, dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Lam Ujong dan Lam Sabang
- Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Lampuuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Lamasan

[67] *RPJMG, Profil Kecamatan Darussalam, Tahun 2019, di kutip pada tanggal 27 juni 2022*

- Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Lam Keneung

[68]Tabel Data 4.1 Jumlah Penduduk gampong Lam Gawee

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki- laki	114 jiwa
Perempuan	125 jiwa
Jumlah	**239 jiwa**

Sumber: profil gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Tabel Data 4.2 Jumlah Pendidikan di Desa Lamgawe

Jenis Pendidikan	Jumlah Jiwa
Lulus SD	40 jiwa
Lulus SMP	15 jiwa
Lulus SMA	25 jiwa
Lulus S1/S2	10 jiwa
Tidak Sekolah	100 jiwa
Jumlah	**190 jiwa**

Sumber: profil gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Tabel Data 4.3 Jumlah Pekerjaan di gampong Lam Gawee

Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
PNS	8 jiwa
Buruh	20 jiwa
Petani	50 jiwa

[68] *Data gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2022, di kutip pada tanggal 27 juni 2022*

Pedagang	30 jiwa
Peternak	10 jiwa
Mahasiswa	15 jiwa
Nelayan	2 jiwa
Pengangguran	7 jiwa
Jumlah	**112 jiwa**

Sumber: profil gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Tabel Data 4.4 Pembagian Wilayah Menurut Dusun/ Jurong

Nama Dusun	Nama Ketua	Pekerjaan	Alamat	No Hp
Dusun Mulia	Muslem	Petani	Desa Lamgawe	-
Balee Lheuk	Agus Heriadi	Petani	Desa Lamgawe	-
Teungku jurong	Muhammad	Petani	Desa Lamgawe	-

Sumber: profil gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Tabel Data 4.5 Organisasi Kepemudaan Gampong Lam Gawee

Jabatan	Pengurus	No HP
Ketua	Muhammad Shaleh	-
Sekretaris	Zulfikar	-
Bendahara	Rijal Habibi	-

Sumber: profil gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Tabel Data 4.6 Tuha Peut Desa Lamgawe

Jabatan	Pengurus	No HP
Ketua	Drs. Saifuddin	
Wakil Ketua	-	-
Sekretaris	Mustafa	-
Anggota Satu	Said Adnan	-
Anggota Dua	Adnan	-
Anggota Tiga	Muzakkir	-
Anggota Empat	Muhammad Shaleh	-

Sumber: profil gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Tabel Data 4.7 Vaksinasi Masyarakat Gampong Lamgawe

Jumlah Masyarakat	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
239 jiwa	100 jiwa	139 jiwa

Sumber: profil gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG LAMGAWE,

KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

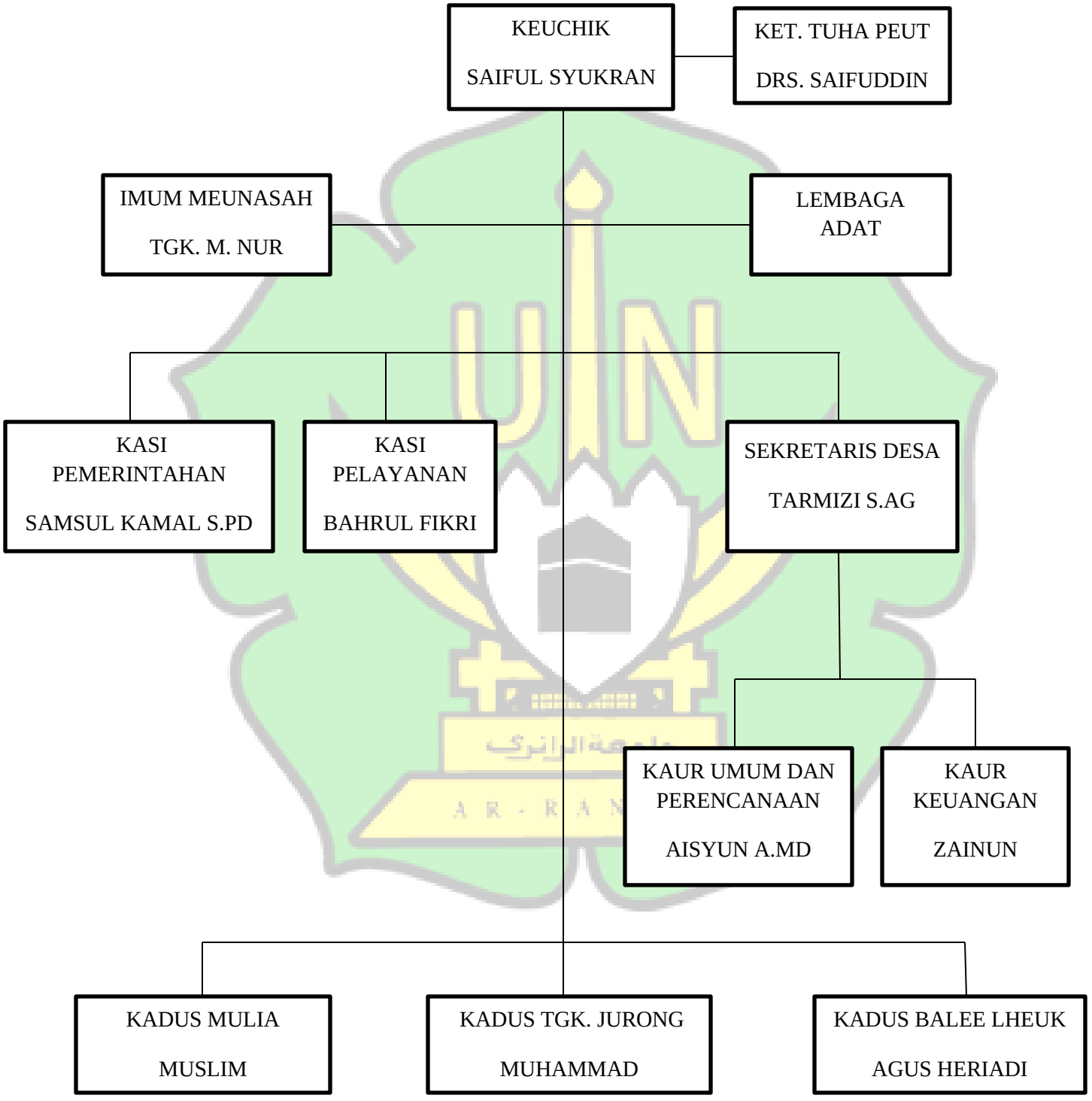

Secara umum masyarakat di Gampong Lam Gawee memiliki mata pencaharian sebagai petani dan wiraswatsa dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan misalnya: pedagang, buruh, nelayan, ibu rumah tangga, pensiunan, pegawai negeri sipil, dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Lam Gawee menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian. Hal tersebut tentunya di dukung oleh kondisi geografis dan strategis. Bagi masyarakat Lam Gawee bertani adalah pekerjaan utama, dari hasil yang didapatkan mereka menghidupi keluarganya mulai dari biaya makan anak-anak, bersekolah dan lain sebagainya. Dengan begitu kondisi budaya bertani merupakan gambaran dari kehidupan dan budaya kerja masyarakat.

Dari segi keagamaan, masyarakat gampong Lam Gawee pada umumnya menganut Agama Islam. Masyarakat di gampong ini masih menjunjung tinggi kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan. Seperti rutin melakukan pengajian, qatam Qur'an, serta pengajian yang dilakukan rutin pada setiap malam jum'at ataupun pada saat ada kematian dalam wilayah gampong tersebut. Masyarakat gampong Lam Gawee juga masih melestarikan budaya lokal seperti keujereun blang, tulak bala, dan masih banyak lagi budaya-budaya yang ada di gampong tersebut. Pada hakikatnya masyarakat di gampong Lam Gawee masih menjunjung tinggi bidang keagamaan serta masih terjaganya kebudayaan-kebudayaan yang ada di gampong tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Aisyun selaku masyarakat gampong Lam Gawee, Beliau mengatakan bahwa “menurot lon, vaksin nyan hana get ke tuboh tanyo karna kaleuh takalon ureung yang kaleuh di vaksin na cit mantong yang saket dan bahkan kondisi ureung nyan na yang lebeh parah ladom itubit merah-merah bak badan. Makajih hana ek lon vaksin ”. [69]

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nila Kausari selaku masyarakat gampong Lam Gawee, beliau mengatakan bahwa “lon takut di vaksin sebab lee tat haba dan kejadian yang ta kalon dari efek vaksin rame yang lumpuh sampe meninggai leuh di vaksin. Dan pun efek samping vaksin kedepan jih hana jelas lom kiban bagi kesehatan tuboh”.[70]

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rizal Fahmi selaku masyarakat gampong Lam Gawee, beliau mengatakan bahwa “lon kedro hana kutem vaksin karna yo kuh mate karna dalam vaksin nyan aleh peu dum diboh kadang”.[71]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Lidiya selaku masyarakat Lam Gawee, beliau mengatakan bahwa “han ta kejeut vaksin sembarangan karna efek sampeng jih aleh peu-peu kadang enteuk jeut bak tanyo,lebeh get kubayeu sang daripada diyu vaksin”.[72]

---

[69] *Hasil wawancara dengan bapak Aisyun, seorang Pedagang di gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

[70] *Hasil wawancara dengan ibu Nila Kausari, seorang Guru Kontrak di gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

[71] *Hasil wawancara dengan bapak Rizal Fahmi, seorang petani di gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

[72] *Hasil wawancara dengan ibu Lidiya, seorang PNS di gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 Juni 2022*

2. Gampong Lamreh

Gampong Lamreh terletak di jalan Tengku Gle Iniem, kemukiman Siem Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. gampong Lamreh terdiri dari 4 dusun, yaitu: (1) dusun Lamreh ; (2) dusun Bung; (3) dusun Lam ue; (4) dusun Lambileh.

Dengan demikian, gampong Lamreh mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Leupung Ule Alue
- Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Lam Asan
- Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Siem
- Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Lieu[73]

Tabel Data 4.8 Jumlah Penduduk Gampong Lamreh

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki-laki	360 jiwa
Perempuan	369 jiwa
Jumlah	729 jiwa

Sumber: profil gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Berdasarkan data di atas, maka menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Gampong Lamreh lebih unggul daripada jumlah laki-laki di Gampong Lamreh.

---

[73] *Data gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tahun 2022, di kutip pada tanggal 27 juni 2022*

Tabel Data 4.9 Jumlah Pekerjaan Masyarakat di Gampong Lamreh

Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
Petani	132 jiwa
Pedagang	36 jiwa
Peternak	83 jiwa
Pertukangan	15 jiwa
Sopir	10 jiwa
Pekerja bengkel	2 jiwa
Pengrajin/home industry	11 jiwa
Wiraswasta	48 jiwa
PNS/TNI/POLRI	28 jiwa
Jumlah	**365 jiwa**

Sumber: profil gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Tabel Data 4.10 Vaksinasi Masyarakat Gampong Lamreh

Jumlah Masyarakat	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
729 jiwa	423 jiwa	306 jiwa

Sumber: profil desa Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 27 Juni 2022

Secara umum masyarakat di gampong Lamreh memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang

pekerjaan misalnya: pedagang, pertukangan, sopir, pekerja bengkel, pengrajin (home industry), wiraswasta, pegawai negeri sipil.

Sebagian besar masyarakat Lamreh menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian. Hal tersebut tentunya di dukung oleh kondisi geografis dan strategis. Bagi masyarakat Lamreh bertani adalah pekerjaan utama, dari hasil yang didapatkan mereka menghidupi keluarganya mulai dari biaya makan anak-anak, bersekolah dan lain sebagainya. Dengan begitu kondisi budaya bertani merupakan gambaran dari kehidupan dan budaya kerja masyarakat.

Dari segi keagamaan, masyarakat Gampong Lamreh pada umumnya menganut Agama Islam. Masyarakat di Gampong ini masih menjunjung tinggi kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan. Seperti rutin melakukan dalail khairat setiap malam juam'at, rutin melakukan pengajian pada setiap malam minggu, dan pada saat ada kematian dalam wilayah gampong tersebut,. Masyarakat Gampong Lamreh juga masih melestarikan budaya lokal seperti kenduri blang, kenduri jeurat, tulak bala, dan masih banyak lagi budaya-budaya yang ada di gampong tersebut. Pada hakikatnya masyarakat di Gampong Lamreh masih menjunjung tinggi bidang keagamaan serta masih terjaganya kebudayaan-kebudayaan yang ada di gampong tersebut.

Penyaluran vaksinasi di gampong Lamreh mulai disalurkan dikalangan masyarakat pada awal tahun 2020. Banyak masyarakat yang meragukan vaksin tersebut mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua, hal tersebut dikarenakan pengaruh media online tentang isu-isu yang belum tentu benar mengenai vaksin yang

beredar, akan tetapi ada juga sebagian dari masyarakat Lamreh yang mau melakukan vaksinasi guna untuk kesehatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hasbi Bintang selaku masyarakat gampong Lamreh, Beliau mengatakan "vaksin nyan cit hana get untuk tuboh tanyo, rame dum takalon bak tv ureung saket, mate aleuh di vaksin dan nyan menjadi alasan lon hana kutem vaksin". [74]

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Syahrul Ramadhan selaku masyarakat, Beliau mengatakan bahwa" saya tidak mau untuk di vaksin dikarenakan ragu dengan bahan-bahan pembuatan vaksin, banyak kita lihat warga yang sudah vaksin ada juga yang sakit, jadi tidak ada jaminan setelah di vaksin itu kita tidak kena penyakit corona".[75]

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nurhayati selaku masyarakat Gampong Lamreh, beliau mengatakan bahwa "lon han ek ku vaksin karna menurot lon vaksin nyan hana tente haleu dan pun hana tente aleuh ta vaksin tanyo hana saket". [76]

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yulianti selaku masyarakat gampong Lamreh, Beliau mengatakan bahwa"alasan lon hana lon tem vaksin karna

---

[74] *Hasil wawancara dengan bapak Hasbi, seorang Petani di gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

[75] *Hasil wawancara dengan bapak Syahrul Ramadhan, seorang Satpam di gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

[76] *Hasil wawancara dengan ibu hayati, seorang Peternak di gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

bagi lon penyaket corona nyan hana dan vaksin nyan hana meutatepeu pih peu diboh dum didalam. [77]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Miftahul Jannah selaku masyarakat gampong Lamreh, beliau mengatakan bahwa ”saya pribadi tidak bersedia untuk di vaksin karena tidak yakin dengan proses pembuatan vaksin dan jangka waktu uji coba terlalu cepat”. [78]

3. Gampong Miruek Taman

Gampong Miruek Taman terletak di jalan Lambaro Angan- Cot Paya kemukiman Lambaro Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. gampong Miruek Taman terdiri dari 4 dusun, yaitu: (1) dusun Pandee; (2) dusun Datok; (3) dusun Blahdeh; (4) dusun punteut.

Dengan demikian, gampong Miruek Taman mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Lambada Peukan dan Gampong Cot
- Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Lampeudaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Miruek Lamreudep Kec. Baitussalam dan Angan

---

[77] *Hasil wawancara dengan ibu Yulianti, seorang Pembuat Kue (Home Industri) di gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

[78] *Hasil wawancara dengan ibu Miftahul Jannah, seorang PNS di gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 juni 2022*

- Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam[79]

Tabel 4.11 Stuktur Tuha Peut Gampong Miruek Taman

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Zamri A. Rafar	Ketua
2.	H. Ansarullah, S.H.,M.H	Wakil Ketua
3.	Ivan Dariansyah	Sekretaris
4.	Drs.Sri Darmawan	Anggota
5.	Hj. Faridah Usman, A.Md.pd	Anggota
6.	Saiful Teuku Samidan	Anggota

Sumber: profil gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 28 Juni 2022

Tabel 4.12 jumlah pekerjaan di gampong Miruek Taman

No	Nama Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Pedagang	150 jiwa
2.	Petani	200 jiwa
3.	Peternak	100 jiwa
4.	Pengrajin/ home industry	20 jiwa
5.	PNS	100 jiwa

[79] *Data gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tahun 2022, dikutip pada tanggal 28 juni 2022*

6.	Wiraswasta	50 jiwa
Jumlah		620 jiwa

Sumber: profil gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, diambil pada tanggal 28 Juni 2022

Tabel Data 4.13 tentang vaksinasi masyarakat Miruek Taman

Jumlah Masyarakat	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
1157 jiwa	500 jiwa	557 jiwa

Secara umum masyarakat di Gampong Miruek Taman memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani, sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan misalnya: peternak, pengrajin (home industry), wiraswasta, pegawai negeri sipil.

Sebagian besar masyarakat Miruek Taman menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor perdagangan dan pertanian. Hal tersebut tentunya di dukung oleh kondisi geografis dan strategis. Bagi masyarakat Mireuk Taman berdagang dan bertani adalah pekerjaan utama, dari hasil yang didapatkan mereka menghidupi keluarganya mulai dari biaya makan anak-anak, bersekolah dan lain sebagainya. Dengan begitu kondisi budaya berdagang dan bertani merupakan gambaran dari kehidupan dan budaya kerja masyarakat.

Dari segi keagamaan, masyarakat Gampong Miruek Taman pada umumnya menganut Agama Islam. Masyarakat di gampong ini masih menjunjung tinggi

kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan. Seperti rutin melakukan dalail khairat setiap malam juam'at, rutin melakukan pengajian pada setiap malam kamis, dan pada saat ada kematian dalam wilayah gampong tersebut, Masyarakat gampong Miruek Taman juga masih melestarikan budaya lokal seperti keujereun blang, tulak bala, dan masih banyak lagi budaya-budaya yang ada di gampong tersebut. Pada hakikatnya masyarakat di gampong Miruek Taman masih menjunjung tinggi bidang keagamaan serta masih terjaganya kebudayaan-kebudayaan yang ada di gampong tersebut.

Penyaluran vaksinasi di Gampong Miruek Taman mulai disalurkan dikalangan masyarakat pada tahun 2020/2021. Banyak dari masyarakat yang meragukan vaksin tersebut mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua, hal tersebut dikarenakan pengaruh media online tentang isu-isu yang belum tentu benar mengenai vaksin yang beredar, akan tetapi ada juga sebagian dari masyarakat Miruek Taman yang mau melakukan vaksinasi guna untuk kesehatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Syamsidar selaku masyarakat Miruek Taman, beliau mengatakan bahwa "ngon usia lon yang ka tuha meuno adak ku vaksin hana ku vaksin menyo saket ngon mate ya tetap saket cit. peu yak peugah le that haba".[80]

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu azlina selaku masyarakat Miruek Taman, beliau mengatakan bahwa "vaksin kon sebuah tolak ukur untuk tanyo sehat

---

[80] *Hasil wawancara dengan ibu Syamsidar, seorang ibu Rumah Tangga di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 juni 2022*

ataupun saket, mandum nyan ka geu ato le allah ta'ala jadi awak nyan adak ipugah nyo jeh that hana kutem vaksin cit".[81]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak iskandar selaku masyarakat Miruek Taman, beliau mengatakan bahwa "lon han ek ku vaksin karna menurot lon nyan tok politik awak nyan, awak nyan mangat itume peng lah tanyo hana mepeu Cuma ibi minyeuk goreng".[82]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak asmadi selaku masyarakat Miruek Taman, beliau mengatakan bahwa "lon han ek ku vaksin sebab hana meutatepeu pih dalam vaksin nyan pu diboh dum, vaksin yang ijok ke awak rayeuk pasti beda ngon ata ijok ke tanyo".[83]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[81] *Hasil wawancara dengan ibu Azlina, seorang Guru di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 juni 2022*

[82] *Hasil wawancara dengan bapak Iskandar, seorang Petani di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 juni 2022*

[83] *Hasil wawancara dengan bapak Asmadi, seorang Peternak di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 juni 2022*

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG MIRUEK

TAMAN KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

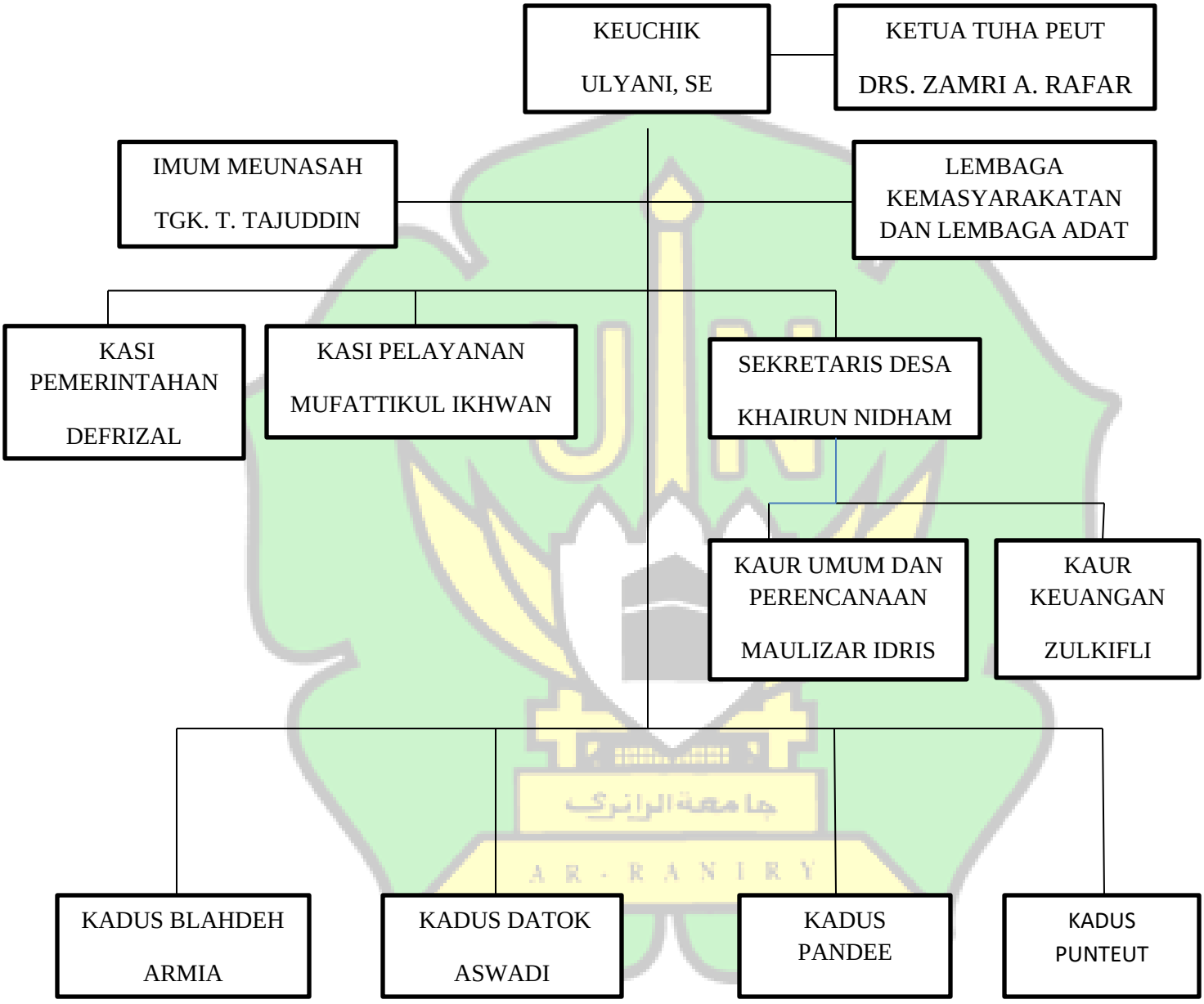

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mensosialisasi Vaksinasi

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam. Untuk masyarakat Aceh sendiri mempertimbangkan kehalalan suatu produk apalagi obat-obatan. Mereka berpegang teguh pada kehalalan karna menurut mereka apa yang masuk ke dalam tubuh mereka akan menjadi darah daging dan berefek dalam waktu ke depan. Pemerintah daerah tingkat Kecamatan Darussalam melakukan berbagai upaya strategi dalam menangani penolakan vaksinasi Covid-19. Maka sesuai dengan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 perihal pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Maka dibentuklah sebuah tim yang bertugas untuk *responding to crisis* untuk menangani krisis terkait dengan Covid-19 di Kecamatan Darussalam. Upaya vaksinasi menjadi tema besar di berbagai Negara termasuk Indonesia. Termasuk pemerintah tentu harus mempersiapkan semua elemen agar mampu menghadapi dampak dari wabah ini. Beberapa strategi telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Kecamatan Darussalam dengan menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penerapan PSBB.

Peniliti melakukan wawancara (*Interview*) dengan Muspika (Camat) di Kecamatan Darussalam. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staf kantor camat bagian kasi Kesra dan Kista Kecamatan Darussalam yaitu Ibu Nurbaiti S.E,

beliau menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi ke gampong-gampong dengan cara mengadakan rapat dengan seluruh Keucik yang ada di kecamatan Darussalam guna pembagian tugas untuk setiap gampong dalam melakukan sosialisasi Vaksin”.[84]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Ulyani selaku keucik Gampong Miruek Taman. Beliau menyatakan “dalam sosialisasi vaksin tingkat desa yang gerai vaksinnya dilaksanakan di lapangan bola gampong tersebut. Aparatur gampong bekerjasama dengan tim satgas Covid-19, puskesmas, Kapolres Aceh Besar, kapolsek kecamatan beserta koramil. Banyak warga yang menolak untuk vaksin dikarenakan pengaruh faktor lingkungan, media yang beredar sehingga membuat masyarakat kurang yakin terhadap vaksin. Adapun langkah yang di lakukan oleh aparatur gampong Miruek Taman dalam menarik perhatian masyarakat agar mereka mau melakukan vaksin yaitu dengan dengan menggandeng tokoh agama baik itu ustadz/ tengku untuk menyampaikan pengertian vaksin, fungsi daripada vaksin, tingkat keamanan vaksin dan efek apabila tidak vaksin bagi tubuh serta kehalalan vaksin itu sendiri. [85]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Nizam selaku sekdes di gampong Miruek Taman. Beliau menyatakan bahwa “ dalam sosialisasi vaksin tingkat desa yang gerai vaksinnya dilaksanakan di lapangan bola gampong tersebut.

---

[84] *Hasil wawancara dengan ibu Nurbaiti, seorang Staf bagian Kesra dikantor Camat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 29 juni 2022*

[85] *Hasil wawancara dengan ibu Ulyani, seorang Keucik di gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 30 juni 2022*

Aparatur gampong bekerjasama dengan tim satgas Covid-19, puskesmas, kader Posyandu, Kapolres Aceh Besar, kapolsek sektor kecamatan beserta koramil sektor kecamatan. Banyak warga yang menolak untuk vaksin dikarenakan pengaruh faktor lingkungan, media yang beredar sehingga membuat masyarakat kurang yakin terhadap vaksin. Adapun langkah yang di lakukan oleh aparatur gampong Miruek Taman dalam menarik perhatian masyarakat agar mereka mau melakukan vaksin yaitu dengan menggandeng tokoh agama untuk menyampaikan pengertian vaksin, fungsi daripada vaksin, tingkat keamanan vaksin dan efek apabila tidak vaksin bagi tubuh serta kehalalan vaksin itu sendiri.[86]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber lainnya yaitu bapak Saiful Syukran selaku keucik gampong Lam Gawee. Beliau menyatakan " Dalam mensosialisasikan vaksin tingkat desa yang dilakukan di aula balai pertemuan gampong Lam Gawee, mereka bekerja sama dengan beberapa sektor lembaga yakni kapolsek, puskesmas dan koramil dari Kecamatan. Banyak warga yang menolak untuk vaksin dikarenakan pengaruh faktor media yang beredar sehingga membuat masyarakat kurang yakin terhadap vaksin. Adapun langkah yang di lakukan oleh aparatur gampong Lam Gawee dalam menarik perhatian masyarakat agar mereka mau melakukan vaksin dengan menyampaikan pengertian daripada vaksin, fungsi daripada vaksin, tingkat keamanan vaksin dan efek apabila tidak vaksin untuk tubuh. Sebenarnya vaksin bukan hal baru dalam dunia kesehatan, contohnya seperti penyakit

---

[86] *Hasil wawancara dengan bapak Nizam, seorang Sekdes Miruek Taman di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 30 juni 2022*

campak, mereka juga melakukan vaksin akan tetapi kegunaan dari vaksin itu saja yang berbeda.[87]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber lainnya yaitu, Bapak Ahlul Fikri selaku Keucik Gampong Lamreh. Beliau menyatakan "dalam mensosialisaikan vaksin tingkat desa yang di lakukan di perkarangan masjid gampong lamreh, aparatur gampong bekerja sama dengan beberapa sektor lembaga yakni kapolsek, puskesmas dan sektor lainnya. Banyak warga yang menolak untuk vaksin dikarenakan pengaruh faktor media yang beredar sehingga membuat masyarakat kurang yakin terhadap vaksin. Adapun langkah yang di lakukan oleh aparatur gampong Lamreh dalam menarik perhatian masyarakat agar mereka mau melakukan vaksin dengan menyampaikan pengertian vaksin, fungsi daripada vaksin, tingkat keamanan vaksin dan efek setelah vaksin untuk tubuh. Sebenarnya vaksin bukan hal baru dalam dunia kesehatan, contohnya seperti penyakit campak, mereka juga melakukan vaksin akan tetapi kegunaan dari vaksin itu saja yang berbeda.[88]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan BABINSA gampong Lamreh yaitu bapak Firdaus, beliau mengatakan bahwa pihak aparatur Negara saat mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat mereka menghimbau agar masyarakat bersedia untuk di vaksin dengan berbagai alasan, baik dengan menjelaskan

---

[87] *Hasil wawancara dengan bapak Saiful Syukran, Keuchik di gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 1 juli 2022*

[88] *Hasil wawancara dengan bapak Ahlul Fikri, Keuchik di gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 2 juli 2022*

kandungan vaksin yang memiliki kandungan vitamin, membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka sudah di vaksin dengan adanya kartu vaksin.[89]

C. Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Penolakan Vaksinasi

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan dalam menangani penolakan vaksinasi yaitu memberikan sembako kepada masyarakat khususnya bapak-bapak dan ibu- ibu yang sudah vaksin, dan untuk anak-anak sendiri Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan memberikan susu, snack, mengadakan undian dan pemberian kuota internet, hal ini di lakukan semata mata guna untuk menarik perhatian masyarakat agar mereka bersedia untuk melakukan vaksin. Tidak menyerah dengan itu saja, Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan terus memikirkan bermacam-macam strategi agar masyarakat bersedia untuk vaksin dengan kesadaran diri masing-masing.

Di gampong Miruek Taman sendiri, Pejabat gampong memberikan apresiasi kepada masyarakat yang bersedia di vaksin yaitu dengan memberikan sembako dari hasil dana keucik pribadi.

---

[89] *Hasil wawancara dengan bapak Firdaus, BABINSA di gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 2 juli 2022*

D. Faktor penyebab masyarakat tidak mau melakukan vaksinasi

Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di berbagai dunia. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya vaksinasi. Vaksin Covid-19 semakin digencarkan di berbagai Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu langkah penangan Covid-19. Tujuannya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

Banyak negara termasuk Indonesia kini menerapkan kebijakan pelonggran aktivitas bagi warna negara yang sudah melakukan Vaksin Covid-19, masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dapat melakuakn perjalan bebas tanpa karantina hingga mulai diizinkan untuk melepas masker di tempat umum. Dengan demikian Pemerintah Indonesia meluncurkan program vaksinasi Covid-19 gratis agar setiap warga negara bisa melakukan vaksinasi tanpa kendala apapun.

Meskipun begitu di masyarakat sendiri timbul pro dan kontra terkait vaksin covid-19. Sejumlah kalangan menolak untuk di vaksin dengan berbagai alasan. Sehingga menjadi suatu tantangan besar untuk pemerintah dalam menuntaskan vaksinasi di masyarakat. Adapun penyebab masyarakat tidak mau melakuakn vaksinasi yaitu:

1. Tidak percaya terhadap virus

Sejak awal munculnya virus SARS Cov-2 penyebab Covid-19, kebanyakan masyarakat tidak mempercayai keberadaan nya. Beberapa kelompok masyarakat

menganggap bahwa virus corona hanyalah sesuatu yang belum benar, propaganda hingga upaya mencari keuntungan dengan menebar ketakutan. Ketidakpercyaan masyarakat terhadap virus otomatis membuat masyarakat juga tidak percaya terhadap vaksin,maka dari itu tidak sedikit orang yang menolak vaksin.

2. Kurangnya informasi tentang vaksin

Dengan adanya keterbatasan mengenai jenis vaksin, ketersediaan vaksin, sasaran vaksin, keamanan vaksin hingga efek samping yang mungkin di timbulkan setelah vaksin membuat masyarakat ragu menjalani vaksinasi. Kurangnya informasi mengenai vaksin di kalangan masyarakat berkaitan dengan kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat.

3. Keyakinan dan nilai yang di anut

Keyakinan agama turut memegaruhi penolakan terhadap vaksin, hal ini berkaitan dengan nilai yang dianut termasuk persepsi terhadap vaksinasi hingga kehalalan vaksin Covid-19.

4. Pengaruh lingkungan & Media

Media social dan orang-orang terdekat turut memegaruhi seseorang dalam melakukan vaksinasi. Apabila orang-orang di sekitar anda atau media social menampilkan hal buruk tentang vaksin, kemungkinan besar masyarakat tidak mau untuk di vaksin Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk strategi Pemerintah Daerah Kecamatan Darussalam dalam upaya menangani kasus penolakan vaksinasi dan kebijakan yang dilakukan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus dimana data diperoleh dari semua pihak Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani penolakan vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat baik itu di desa Lam Gawee, Lamreh dan desa Miruk Taman yaitu dengan cara memberikan Sembako seperti minyak goreng, beras, telur, kecap dan lainnya.
2. Selain memberikan sembako kepada masyarakat, strategi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh bidan pukesmas yang dibantu oleh gabungan satgas Covid-19, Kapolsek Kecamatan, Koramil dan Muspika Gampong.
3. Kebanyakan masyarakat tidak mau di vaksin dikarenakan mereka meyakini bahwasanya di dalam vaksin tersebut mengandung zat babi.
4. Masyarakat meyakini bahwa adanya efek samping dari vaksin tersebut. Informasi itu di peroleh dari masyarakat lainnya ataupun dari mulut ke mulut

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Diharapkan kepada semua masyarakat yang berada di Kecamatan Darussalam agar selalu meng-update informasi-informasi terbaru mengenai vaksin Covid-19 dari sumber yang terpercaya seperti website Kementrian Kesehatan, World Health Organisation (WHO) dan dinas Kesehatan agar bias membedakan mana informasi yang benar dan informasi yang salah.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada Pemerintah untuk meningkatkan profil informasi tentang vaksinasi Covid-19 yang baik dan menempatkan label peringatan pada informasi yang kurang baik dengan cara memblokir website yang menyebarkan informasi palsu mengenai vaksin Covid-19 yang beredar di sosial media.

3. Bagi Peneliti lain

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19 dengan melakukan penelitian kepada masyarakat yang sudah melakukan vaksin Covid-19, kemudian diharapkan untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Albi, Anggito. ddk. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.

Argista, Zisi Lioni Argista. (2021). "Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19 di Sumatera Selatan". Palembang: Universitas S riwijaya.

Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998..

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Pers.

Bpba.Acehprov.go.id. "Penerapan Jam Malam di Aceh Resmi Dicabut." Retrieved (https://Bpba.Acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penerapan-jammalam-di-Aceh resmi-dicabut.html).

Buletin APBN: Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. (2021). 6:7.

Dewita Hia, Y. (2015). "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran. Economica". 1(2). h. 208-213.

Dr. dr. Martira Maddeppungeng, SpA(k). (2018). *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*. (Makassar: Universitas Hasanuddin.

Eddy Munawar, "Studi Perilaku Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Pandemi Covid-19" Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, h. 5.

Ernawati, Rahayu. (2008). "Peran Vaksinasi dalam Mengantisipasi Penyakit Zoonosis akibat Pemanasan Global". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Fahrika, Ika. dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang di tempuh". *Jurnal*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Fathoni, H. Abdurrahmat . (2006). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca No 14, Tahun 2021.

Heryana, Ade. (2020). "Penolakan Terhadap Vaksinasi". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Esa Unggul,

Hutapea, (2017). "Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Kasawan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara" *Jurnal Organisasi Manajemen*. 4(1).

Kasmira. (2020). "Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa" *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.

Kemenkes RI. Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes RI, Surat Edaran Tentang Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).

Kemenkes RI. (2020). Survey Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia.

Kementrian Keuangan. *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), No. 11, Tahun 2020.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden RI tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1, No. 7, tahun 2020.

Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), No. 12, Tahun 2020.

Made W. (2015). *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer In*. Jakarta: Bumi Aksara.

Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19), No. 84, Tahun 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (2020). No. 84.

Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) No 84 Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 18 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah No 11, PUU-VI,2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 18 ayat 5 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, No 64, PUU-XVII,2010

Rahayu , Ani Sri. (2017). "Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya". Malang : Sinar Grafika.

Rahayu1, Rochani Nani. dkk.(2021). "Vaksin Covid 19 di Indonesia : Analisis Berita Hoax". *Jurnal Ekonomi, Sosial, Humaniora.* 2(7): 44.

Rahmawati, Malita Lely. "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19)".

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Pratiwi. dkk. (2017). "Gambaran Penolakan Masyarakat terhadap Imunisasi Dasar lengkap bagi Balita (Studi di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)". *Jurnal* Kesehatan *MasyarakatI.* 5(5):1083-1084.

Suni, Nur Sholikah Putri. (2022). "Perkembangan Vaksin Merah Putih dan Tantangannya". *Jurnal Info Singka*t. 16(4): 26.

Suryono. (2004). " Pengantar Teori Pembangunan". Malang: Universitas Negeri Malang.

Syafiie, Inu Kencana. (2010). Pengantar ilmu pemerintaha. Jakarta: Refika Aditama.

UU No. 2 Tahun 2020, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Di Tetapkan pada Tanggal 31 Maret 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI tentang Pemerintah Derah Nomor 23. Tahun 2014.

Warta Pemeriksa: BPK Soroti Program Vaksinasi-19. (2021) 6:12.

Winanto, Yudho. (2020), Mengenal jenis dan manfaat vaksin Covid-19.

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.999/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry.
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Imelda Suri
NIM/Jurusan : 160403044/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 Februari 2022
23 Rajab 1443

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
*SK berlaku sampai dengan tanggal: **24 Februari 2023***

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2296/Un.08/FDK-1/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Bapak/Ibu Camat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
2. Bapak/Ibu Keucik serta Staf Jajarannya di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IMELDA SARI / 160403044**
Semester/Jurusan : XII / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Lamgugob Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
Jalan Lambaro Angan Kilometer 12 Kode Pos 23373
Email: kecamatandarussalam@gmail com

Lambaro Angan, 5 Juli 2022

Nomor : 070/ 374
Lampiran : -

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN-ARANIRY

Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

di-
Tempat

Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa:

Nama	: IMELDA SARI
Nim	: 160403044
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Semester	: XII
Judul Penelitian	: Strategi Pemerintah Daerah dalam menangani kasus penolakan Vaksinasi oleh masyarakat (studi kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

Telah selesai melaksanakan penelitian tanggal 5 Juli 2022.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

CAMAT DARUSSALAM

Burhanuddin, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19760224 200604 1 015

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAMREH
SEKRETARIAT : JLN. A.RAHMAN. GAMPONG LAMREH KEC DARUSSALAM
Email :Lamreh.drslm@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 99/1228/SK/VII/2022

Keuchik Gampong Lamreh Kemukiman Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	**: Imelda Sari**
Nim	**: 160403044**
Fak.Prodi	**: Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah**
Alamat	**: Desa Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar**

Benar telah melakukan penelitian di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 Juni s/d 5 Juli 2022 dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul **"Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi oleh Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)".**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Lamreh, 05 Juli 2022
Keuchik Lamreh

AHLUL FIKRI, S. Th.I

AR-RANIRY

Lanpiran 5

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAM GAWEE
Jln. Blang Bintang lama Kode Pos 23373

SURAT KETERANGAN
Nomor :0394 /2015/2022

Keuchik Gampong Lam Gawee. Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: IMELDA SARI
Nim	: 160403044
Fak.Prodi	: Manajemen Dakwah
Alamat Sekarang	: Lamgugob Banda Aceh

Benar telah melakukan penelitian di Gampong Lam Gawee Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 Juni 2022 s/d 06 juli 2022 dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul **strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).**

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Aceh Besar, 06 Juli 2022
Keuchik Gampong Lam Gawee

SAIFUL SYUKRAN

Lanpiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG MIRUEK TAMAN
Sekretariat : Gampong Miruek Taman Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Kode Pos 23374

SURAT KETERANGAN
Nomor : 199 / 2006 / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ulyani, SE
Jabatan : Keuchik Gampong Miruek Taman

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Imelda Sari
NIM : 160403044
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Alamat : Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh

Benar telah melakukan penelitian di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sejak tanggal 29 Juni s/d 6 Juli 2022 dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul **"Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Penolakan Vaksinasi oleh Masyarakat" (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Miruek Taman, 8 Juli 2022
Keuchik Gampong Miruek Taman

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR GAMPONG MIRUEK TAMAN KECAMATAN DARUSSALAM

ULYANI, SE

Lanpiran 7

Pedoman Wawancara untuk Camat/ Keuchik Kecamatan Darussalam

1. Apa metode Pemerintah Daerah dalam mensosialisasi vaksin di tengah- tengah masyarakat?
2. Apa strategi Pemerintah Daerah dapat membuat masyarakat yakin untuk di vaksin?
3. Apakah terdapat batasan usia masyarakat yang boleh untuk di vaksin?
4. Apa- apa saja faktor yang membuat masyarakat tidak bersedia untuk di vaksin?
5. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk di vaksin? Jika ada apa sanksi nya?
6. Apa saja metode pendekatan Keuchik dalam melakukan vaksinasi?

Pedoman wawancara untuk masyarakat Kecamatan Darussalam

1. Apa yang anda ketahui tentang vaksin?
2. Bagaimana pendapat anda tentang penyaluran vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah?
3. Apakah anda bersedia untuk melakukan vaksin? Mengapa?
4. Apakah ada pembagian hadiah setelah anda melakukan vaksin?
5. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan vaksin?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanpiran 8

Kasi Pemerintahan
Samsul Kamal S.Pd
Sekretaris Gampong
Tarmizi S.Ag
Kasi Pelayanan
Bahrul Fikri
Kaur Keuangan
Zainun
Kaur Umum Dan
Perencanaan
Aisyan A.Md
Kepala Dusun Mulia
Muslim
Kepala Dusun Tgk
Jurong
Muhammad
Kepala Dusun Balee
Leuk
Agus Herindi

SURAT MASUK
SK PERANGKAT

KAUR UMUM DAN
PERENCANAAN

GREENLIGHT

Lanpiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama	: Imelda Sari
Nim	: 160403044
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Gampong Baro, 13 Oktober 1998
Alamat Sekarang	: Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh
Nomor HP	: 081375858825
Email	: imeldasari12387@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN Gampong Baro Tamat Tahun 2010
SMP	. SMP Swasta Darul Abral Tamat Tahun 2013
SMA	: MAS Darul Ihsan Tamat Tahun 2016
Perguruan Tinggi	: UIN Ar-Raniry

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Imran Yahya
Nama Ibu	: Hilda
Pendidikan Ayah	: SMA
Pendidikan Ibu	: SMA
Alamat lengkap	: Jln. Banda Aceh-Meulaboh, Dusun Ujong Aron, Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menerangkan,

Imelda Sari
NIM 160403044

جامعة الرانري
AR-RANIRY